BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perum BULOG

Perum BULOG adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik / pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastic, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari pemerintah, BULOG tetap melakukan kegiatan menjaga Harga Dasar Pembelian untuk gabah, stabilitasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk orang miskin (Raskin) dan pengelolaan stok pangan.[3]

Adapun visi dan misi yang dipegang teguh oleh Perum BULOG antara lain :

1. Visi

   Menjadi perusahaan yang unggul dalam mewujudkan keadaulatan pangan.
2. Misi
   a. Emberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok.
   b. Mencapai pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.
   c. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.[1]

2.2 Beras

Indonesia, 95% dari jumlah penduduknya mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata – rata konsumsi beras sebesar 113,7 kg/jiwa/tahun (BPS,2011), bahkan sebelumnya mencapai 139,15 kg/jiwa/tahun. Tingkat konsumsi tersebut jauh diatas konsumsi beras Negara tetangga seperti Malaysia sebesar 80 kg/kapita/tahun, Thailand 70 kg/jiwa/tahun, dan Jepang 58 kg/kapita/tahun. Dengan demikian Indonesia menjadi negara konsumen beras terbesar di dunia. Beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional akan mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi.[2]

2.3 Program Raskin

Program Raskin sangat strategis dan menjadi program nasional yang dikelola secara lintas sektoral baik vertikal maupun horizontal. Seluruh Kementrian / Lembaga (K/L) terkait, baik di pusat maupun di daerah mengambil bagian tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan program Raskin, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing – masing. Pemerintahan Pusat berperan dalam membuat kebijakkan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas Program Raskin, yang diwujudkan dalam 6 tepat. Para pemangku kepentingan Program Rsin terutama di Provinsi dan Kabupaten/Kota masih perlu meningkatkan kinerja dan koordinasi dengan memberikan konstribusi sumberdaya agar penyaluran Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) lebih efektif dalam mencapai target 6 tepat.[2]

2.4 Sasaran Program Beras Miskin (Raskin)

Sasaran Program Raskin Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 adalah berkurangnya beban pengeluaran RTS (Rumah Tangga Sasaran) berdasarkan data PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial) 2011 yang dikelola

dalam Basis Data Terpadu oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 225 kg/RTS/tahun atau setara dengan 15 kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp. 1.600,00 /kg netto di TD, termasuk alokasi Raskin tambahan tahun 2013 yang disalurkan bulan Juni (Raskin ke-13), Juli (Raskin ke-14), dan September (Raskin ke-15). Adapun sasaran RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat) program Raskin 2013 Provinsi Jawa Barat adalah2.615.790 RTS untuk alokasi Raskin Reguler dan tambahan tahun 2013.[2]

2.4.1 Tujuan Program Raskin

Tujuan program raskin adalah mengurangi beban Rumah tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.[3]

2.4.2 Sasaran Raskin 2014

Sasaran beras Raskin 2014 adalah berkurangnya beban pengeluaran 15.530.897 RTS (Rumah Tangga Sasaran) dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi 15kg/RTS/bulan.

2.4.3 Manfaat Raskin

Adapun manfaat dari Program Raskin adalah sebagai berikut :

1. Stabilisasi harga beras dipasaran.
2. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintahan dengan menetapkan harga beras bersunsidi sebesar Rp.1.600/kg dan menjaga stok pangan nasional.
3. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan soisal dan penanggulangan kemiskinan.
4. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD) maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) di RTS.

5. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.[3]

2.5 Pengelolaan dan Pengorganisasian Raskin

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin perlu diciptakan harmonisasi dan sintegritas antar K/L terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawaban sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implemetasinya, maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin di pusat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan Pelaksanaan Distribusi Raskin di desa / kelurahan / pemerintahan setingkat.

2.5.1 Tim Koordinasi Raskin Pusat

Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin Nasional dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Pusat, adapun Tujuan dan Fungsi sebagai berikut :

Tujuan : Melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan pengendalian dalam perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, sosialisasi, penanganan pengaduan, serta monitoring dan evaluasi.

Fungsi : Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Pusat mempunyai fungsi :

1. Koordinasi perencanaan dan penganggaran Program Raskin.
2. Penetapan Pagu Raskin.
3. Penyusunan Pedoman Umum Penyaluran Raskin.
4. Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin.
5. Pembinaan terhadap pelaksaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Provinsi.
6. Monitoring dan evaluasi pelaksaan Program Raskin di provinsi dan kabupaten/kota.[4]

2.5.2 Tim Koordinasi Raskin Provinsi

Gubernur bertanggung jawab atas jalannya Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Provinsi sebagai berikut :

Kedudukan : Tim Koordinasi Raskin Provinsi adalah pelaksana Program Raskin di provinsi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Tugas : Tim Koordinasi Raskin Provinsi memiliki tugas melakukan perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinas Raskin Pusat.

Fungsi : Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Provinsi mempunyai fungsi :

1. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APDB untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin Provinsi.
2. Penetapan Pagu Raskin kabupaten/kota.
3. Penyusunan Petunjuk Pelaksaan (Juklak) Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2014 (Raskin).
4. Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin.
5. Monitoring dan evaluasi pelaksaana Program Raskin di kabupaten/kota.
6. Penanganan Pengaduan di Provinsi.
7. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin kabupaten/kota.
8. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat.

2.5.3 Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

Bupati / Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Kedudukan : Tim Koordinasi Raskin Kabupaten / Kota adalah pelaksana Program Raskin di kabupaten / kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati / Walikota.

Tugas : Tim Koordinasi Raskin Kabupaten / Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan memnentukan salah satu dari empat alternatif pola penyaluran Raskin (Penyaluran Raskin regular, Warung Desa, Kelompok Masyarakat, Padat Karya Raskin), serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

Fungsi : Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten / Kota mempunyai fungsi :

1. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APDB untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten/ Kota.
2. Penetapan Pagu Raskin kecamatan.
3. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM.
4. Penyusunan Petunjuk Teknis (juknis) Pelaksaan Program Raskin di Kabupaten / Kota.
5. Sosialisasi Program Raskin di wilayan Kabupaten / Kota.
6. Perencanaan penyaluran Raskin.
7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di kecamatan , desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
8. Penanganan pengaduan.

9. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksanaan Distribusi Raskin di desa / kelurahan / pemerintahan setingkat.
10. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

2.5.4 Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggung jawab atas Pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, sebagai berikut :

Kedudukan : Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksanaan Program Raskin di kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Tugas : Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten / Kota.

Fungsi : Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan Penyaluran Raskin di Kecamatan.
2. Sosialiasi Raskin di wilayah kecamatan.
3. Pendistribusian Raskin.
4. Penyelesaian HTR dan administrasi.
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di desa / kelurahan / pemerintahan setingkat.
6. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinsasi Raskin Kabupaten / Kota, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari

tingkat desa / kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari pelaksanaan Distribusi Raskin kepada RTS-PM.

2.5.5 Pelaksanaan Distribusi Raskin di desa / kelurahan / pemerintah setingkat.

Kepala Desa / Lurah / Kepala pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya, dan membentuk Pelaksanaan Distribusi Raskin di wilayahnya, sebagai berikut :

Kedudukan : Pelaksanaan Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa / Lurah / Pemerintahan Setingkat.

Tugas : Pelaksanaan Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pemnayaran HTR, dan meyelesaikan administrasi.

Fungsi : Pelaksanaan Distribusi mempunyai fungsi :

1. Pemeriksaan dan penerimaan / penolakan Raskin dari Perum BULOG di TD. Untuk desa / keluaran / pemerintahan setingkat yang TD-nya tidak berada di desa / kelurahan / pemerintahan setingkat, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Raskin diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).
2. Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dala PDM-1 di titik bagi (TB).
3. Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening bank yang ditunjukan oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
4. Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penanda tanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) berada di TD.

5. Membuat daftar realisasi penjualan beras sesuai model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten /Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.[4]

2.6 Penyaluran Beras BULOG

Penyaluran beras yang dilakukan oleh Perusahaan Umum BULOG ini terdiri dari beberapa Sub Divre, pada Provinsi Jawa Barat terdapat sebanyak 7 Sub Divre antara lain :

1. Sub Divre Bandung
2. Sun Divre Cianjur
3. Sub Divre Cirebon
4. Sub Divre Indramayu
5. Sub Divre Karawang
6. Sub Divre Subang
7. Sub Divre Ciamis

Dalam tiap – tiap Sub Divre yang ada memiliki jumlah data beras yang berbeda dalam setiap penyaluran yang di lakukan dalam setiap harinya, dalam kasus ini akan dijelaskan penyaluran data dalam laporan /tahun.[2]

2.6.1 Pelaksanaan Penyaluran Raskin Reguler

Rincian realisasi per Subdivre per Kabupaten / Kota Tahun 2013 dan persentase realisasi 2012 terinci pada table 2.1.

Dari tabel ditunjukan bahwa realisasi penyaluran Raskin tahun 2012 lebih tinggi dibanding realisasi penyaluran Raskin tahun 2013. Jika pada tahun 2012, relisasi penyaluran mencapai 98,94%, maka tahun 2013 realisasi penyaluran mencapai 97,94% terhadap pagu Raskin. Jika pada tahun 2012 terdapat 10 Kabupaten dan 9 kota yang realisasi penyalurannya mencapai 100% maka pada tahun 2013 terdapat 9 Kabupaten dan 9 Kota yang realisasinya mencapai 100%.

Jika dilihat per Subdivre, hanya 4 Subdivre yang mampu menyalurkan seluruh pagu Raskinnya (100%) yaitu Subdivre Bandung, Cirebon, Indramayu, dan Subang. Sedangkan 3 Subdivre yang lain yaitu Subdivre Cianjur, Karawang dan Ciamis presentase realisasinya lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.[2]

Tabel 2.1 Rencana dan Realisasi Penyaluran Raskin Reguler per Subdivre per Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2013[2]

No.	Subdivre Kab/Kota	Pagu 2013 (Kg)	Realisasi 2013 (Kg)	Sisa Pagu (Kg)	% Realisasi	
					2013	2012
1.	Kab.Bandung	33,649,200	33,649,200	-	100.00	100.00
2.	Kab. Bandung Barat	15,643,440	15,643,440	-	100.00	100.00
3.	Kab. Sumendang	13,340,880	13,340,880	-	100.00	100.00
4.	Kab. Bandung	11,205,900	11,205,900	-	100.00	100.00
5	Kota Cimahi	3,408,120	3,408,120	-	100.00	100.00
	Subdivre Bandung	**77,247,540**	**77,247,540**	**-**	**100.00**	**100.00**
6.	Kab. Bogor	28,060,920	24,749,325	3,311,595	88.20	90.50
7.	Kab. Cianjur	37,709,420	34,344,090	3,647,790	90.40	96.62
8.	Kab. Sukabumi	32,709,420	30,266,625	2,442,795	92.53	98.99
9.	Kota Bogor	7,020,360	7,020,360	-	100.00	100.00
10.	Kota Sukabumi	2,695,500	2,695,500	-	100.00	100.00
11.	Kota Depok	7,398,540	7,398,540	-	100.00	100.00
	Subdivre Cianjur	**115,876,620**	**106,474,440**	**9,402,180**	**91.98**	**96.05**
12.	Kab. Cirebon	31,808,700	31,808,700	-	100.00	100.00
13.	Kab. Kuningan	15,908,220	15,908,220	-	100.00	100.00
14.	Kab. Majalengka	17,924,220	17,924,220	-	100.00	100.00
15.	Kota Cirebon	3,095,280	3,095,280	-	100.00	100.00
	Subdivre Cirebon	**68,736,420**	**68,736,420**	**-**	**100.00**	**100.00**
16.	Kab.	31,320,360	31,320,360	-	100.00	100.00

No.	Subdivre Kab/Kota	Pagu 2013 (Kg)	Realisasi 2013 (Kg)	Sisa Pagu (Kg)	% Realisasi	
					2013	2012
	Indramayu					
	Subdivre Indramayu	**56,844,720**	**31,320,360**	**-**	**100.00**	**100.00**
17.	Kab. Bekasi	16,612,740	16,474,815	137,925	99.17	99.85
18.	Kab. Karawang	29,063,340	28,955,085	108,255	99.63	99.46
19.	Kota Bekasi	11,168,640	11,168,640	-	100.00	100.00
	Subdivre Karawang	**56,844,720**	**56,598,540**	**246,180**	**99.57**	**99.67**
20.	Kab. Subang	22,578,120	22,578,120	-	100.00	100.00
21.	Kab. Purwakarta	8,703,720	8,703,720	-	100.00	100.00
	Subdivre Subang	**31,281,840**	**31,281,840**	**-**	**100.00**	**100.00**
22.	Kab. Tasikmalaya	24,820,560	23,873,460	947,100	96.18	99.56
23.	Kab. Garut	32,803,020	32,589,870	213,150	99.35	99.98
24.	Kab. Ciamis	22,048,560	21,025,815	1,022,745	95.36	100.00
25.	Kab. Tasikmalaya	8,119,080	8,119,080	-	100.00	100.00
26.	Kota Banjar	1,743,480	1,743,480	-	100.00	100.00
	Subdivre Ciamis	**89,534,700**	**87,351,705**	**2,182,995**	**97.56**	**99.87**
	Se-Jabar	**470,842,200**	**459,010,845**	**11,831,335**	**97.49**	**98.94**

2.6.2 Pelaksaan Penyaluran Raskin Tambahan (Raskin ke-13, Raskin ke-14, Raskin ke-15)

Dalam rangka penyesuain harga BBM, Pemerintah melaksanakan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) termasuk salah satunya adalah Program Raskin yaitu sesuai dengan surat Deputi Menko Keras Bidang Koordinasi Raskin Pusat Nomor : B.1116/KMK/DEP.II/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 perihal Addenum Pedum Raskin 2013, surat Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan

Rakyat Nomor : B-95/MENKO/KESRA/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 perihal Tambahan Alokasi Pagu Raskin Provinsi Tahun 2013 dan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 501/3040/Binpro tanggal 21 Juni 2013 perihal Tambahan Pagu Raskin Kabupaten / Kota Tahun 2013.

Pagu Raskin 2013 mendaoat tambahan alokasi selama 3 bulan dengan ketentuan :

1. Jumlah RTS-PM di Jawa Barat tidak mengalami perubahan yaittetap sebanyak 2.615.790 RTS, tetapi ada tambahan alokasi pagu Raskin per Kabupaten/Kota untuk selama 3 bulan.
2. Setiap RTS-PM menerima Raskin sebanyak 15 Kg/bulan untuk bulan Juni (Raskin ke-13), bulan Juli (raskin ke-14), dan bulan September (Raskin ke-15) sehingga pada bulan – bulan tersebut setiap RTS-PM Raskin menerima Raskin sebanyak 30Kg/bulan.

Realisasi penyaluran Raskin tambahan yaitu Raskin ke 13 sebanyak 38,458.275 Kg atau 98,02%, Raskin ke 14 sebanyak 37.720.005 Kg atau 96,13%, Raskin ke 15 sebanyak 34.895.910 Kg atau 88,94% terhadap pagu tambahan sebanyak 39.236.850 Kg/bulan. Sehingga total penyaluran raskin tambahan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebanyak 111.074.190 Kg atau 94,36% dari pagu sebanyak 117.710.550 Kg, terinci pada tabel 2.2.[4]

Tabel 2.2 Rencana dan Realisasi Penyaluran Raskin Tambahan (Ke 13,ke 14 dan ke 15) per Subdivre per Kabupaten / kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2013.[2]

No.	Subdivre bulan (Kg)	Pagu /bulan (Kg)	Realisasi			Sisa Pagu (Kg)	% Realisasi			
			R-13	R-14	R-15		R-13	R-14	R-15	R–13 TA 2012
1.	Kab. Bandung	2.804.100	2.804.100	2.804.100	2.804.100	-	100	100	100	100
2.	Kab. Bandung Barat	1.303.620	1.303.620	1.303.620	1.303.620	-	100	100	100	100
3.	Kab. Sumedang	1.111.740	1.111.740	1.111.740	1.111.740	-	100	100	100	100
4.	Kab. Bandung	933.825	933.825	933.825	933.825	-	100	100	100	100
5.	Kab. Cimahi	284.010	284.010	284.010	284.010	-	100	100	100	100
	Subdivre Bandung	**6.437.295**	**6.437.295**	**6.437.295**	**6.437.295**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**
6.	Kab. Bogor	2.338.410	1.560.645	1.429.905	1.263.315	2.761.365	66.74	61.15	54.02	66.37
7.	Kab. Cianjur	3.165.990	3.165.990	2.566.305	1.324.005	2.441.670	100	81	41.82	77.18
8.	Kab. Sukabumi	2.725.785	2.725.785	2.725.785	1.451.100	1.274.685	100	100	53.42	100
9.	Kota Bogor	585.030	585.030	585.030	585.030	585.030	100	100	100	100
10.	Kota Sukabumi	224.625	224.625	224.625	224.625	224.625	100	100	100	100
11.	Kota	616.545	616.	616.	616.	-	100	100	100	100

No.	Subdivre bulan (Kg)	Pagu /bulan (Kg)	Realisasi			Sisa Pagu (Kg)	% Realisasi			
			R-13	R-14	R-15		R-13	R-14	R-15	R–13 TA 2012
	Depok		545	545	545					
	Subdivre Cianjur	**9.656.385**	**8.878.620**	**8.148.195**	**5.464.620**	**6.477.720**	**91.95**	**84.38**	**56.59**	**84.31**
12.	Kab. Cirebon	2.650.725	2.650.725	2.650.725	2.650.725	-	100	100	100	100
13.	Kab.kuningan	1.325.685	1.325.685	1.325.685	1.325.685	-	100	100	100	100
14.	Kab. Majalengka	1.493.685	1.493.685	1.493.685	1.493.685	-	100	100	100	100
15.	Kota Cirebon	257.940	257.940	257.940	257.940	-	100	100	100	100
	Subdivre Cirebon	**5.728.035**	**5.728.035**	**5.728.035**	**5.728.035**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**
16.	Kab. Indramayu	2.610.030	2.610.030	2.610.030	2.610.030	-	100	100	100	100
	Subdivre Indramayu	**2.610.030**	**2.610.030**	**2.610.030**	**2.610.030**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**
17.	Kab. Bekasi	1.384.395	1.384.395	1.382.220	1.365.240	21.330	100	100	98.62	99.79
18.	Kab. Karawang	2.421.945	2.421.945	2.421.945	2.421.945	-	100	100	100	100
19.	Kota Bekasi	930.720	930.720	930.720	930.720	-	100	100	100	100
	Subdivre Karawang	**4.737.060**	**4.737.060**	**4.734.885**	**4.717.905**	**21.330**	**100**	**100**	**98.62**	**99.79**
20.	Kab. Subang	1.881.510	1.881.510	1.881.510	1.881.510	-	100	100	100	100

No.	Subdivre bulan (Kg)	Pagu /bulan (Kg)	Realisasi			Sisa Pagu (Kg)	% Realisasi			
			R-13	R-14	R-15		R-13	R-14	R-15	R–13 TA 2012
21.	Kab. Purwakarta	725.310	725.310	725.310	725.310	-	100	100	100	100
	Subdivre Subang	**2.606.820**	**2.606.820**	**2.606.820**	**2.606.820**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**
22.	Kab. Tasikmalaya	2.068.380	2.068.380	2.062.710	2.006.580	67.470	100	100	97.01	100
23.	Kab. Garut	2.733.585	2.733.585	2.733.585	2.733.585	-	100	100	99.97	99.97
24.	Kab. Ciamis	1.837.380	1.837.380	1.837.380	1.769.970	67.410	100	100	96.33	100
25.	Kota Tasikmalaya	676.590	676.590	676.590	676.590	-	100	100	100	100
26.	Kota Banjar	145.290	145.290	145.290	145.290	-	100	100	100	100
	Subdivre Ciamis	**7.461.225**	**7.460.415**	**7.454.745**	**7.331.205**	**137.310**	**100**	**100**	**98.26**	**99.99**
	Se- Jabar	**39.236.850**	**38.458.276**	**37.720.005**	**34.895.910**	**6.636.360**	**98.02**	**96.13**	**88.94**	**96.14**

2.7 Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercemin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau serta tidaj bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Adapun tiga pilar ketahanan pangan yang dijadikan panutan dalam Perum BULOG antara lain :

1. Pilar I : Ketersediaan *(Availability)*
2. Pilar II : Keterjangkauan fisik dan ekonomi *(Accessibility)*
3. Pilar III : Stabilitas pasokan dan harga *(Stability)*[4]

2.7.1 Peran BULOG dalam ketahanan Pangan

Peran BULOG yang terdapat dalam ketahanan Pangan dapat dilihat dari bahan pokok yang ada sepeti : beras, kedelai, gula, daging, jagung, minyak goreng dan dilihat pula dari masalah konsumsi dan masalah produksi, setelah di dapat maka akan di ketahui peranan Perum BULOG yaitu :

1. Pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pangan kepada sasaran tertentu.
2. Pembelian dan pemasaran kepada masyarakat umum (BULOG Mart).
3. Bantuan penyaluran pangan bersubsidi.
4. Intervensi pasar.
5. Bantuan bencana alam.[3]

2.7.2 Peran BULOG dalam Penyediaan Bahan

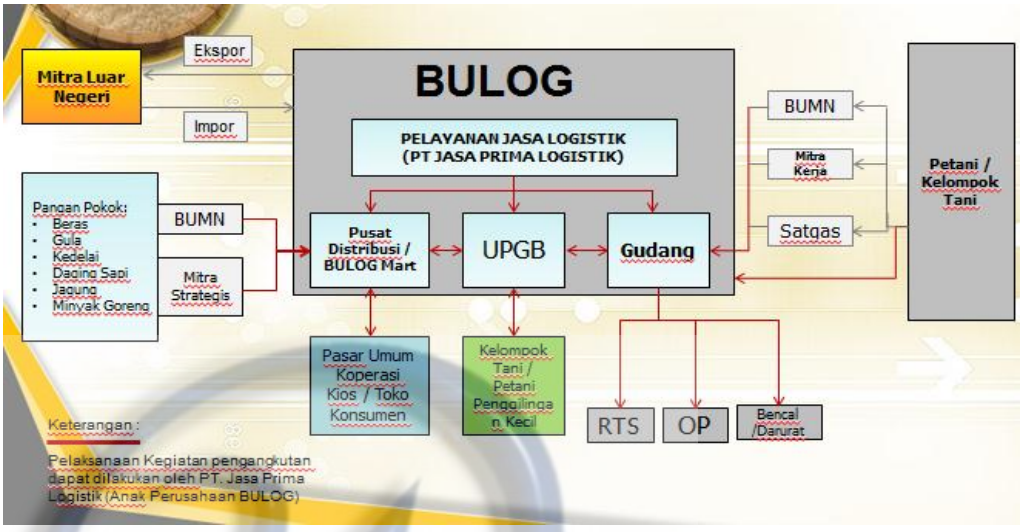

Gambar 2.1 Peran BULOG dalam Penyediaan Bahan[3]

Adapun penjelasan dari bagan di atas adalah sebagai berikut :

1. Mitra Luar negeri melakukan ekspor dan import ke perum BULOG.
2. Pengan pokok (beras, gula, kedelai, daging sapi, jagung dan minyak goreng) di kumpulkan di BUMN yang di dapat dari mitra strategis dan di tamping di perum BULOG.
3. Di dalam perum BULOG di tamping pada bagian Pelayanan Logistik (PT Jasa Prima Logistik) yang nantinya di bagi menjadi 3 kategori, yaitu :

a. Pusat Distribusi / BULOG Mart
b. UPGB
c. Gudang

4. Pada kategori Pusat Distribusi / BULOG Mart berisikan Pasar Umum Koperasi Kios / Toko Konsumen.
5. Pada kategori UPGB berisikan kelompok tani / petani penggilingan kecil.

6. Pada kategori Gudang dibagi menjadi (RTS, OP, Bencana / Darurat) dalam penyaluran yang dilakukan.
7. Petani / kelompok tani melakukan pemasokkan yang di tamping di BUMN dijadikan mitra kerja, satgas yang nantinya pasokan beras tersebut ditampung pada kategori gudang.[3]

2.7.3 Rantai Pengelolaan Beras BULOG yang Tidak Terpisahkan

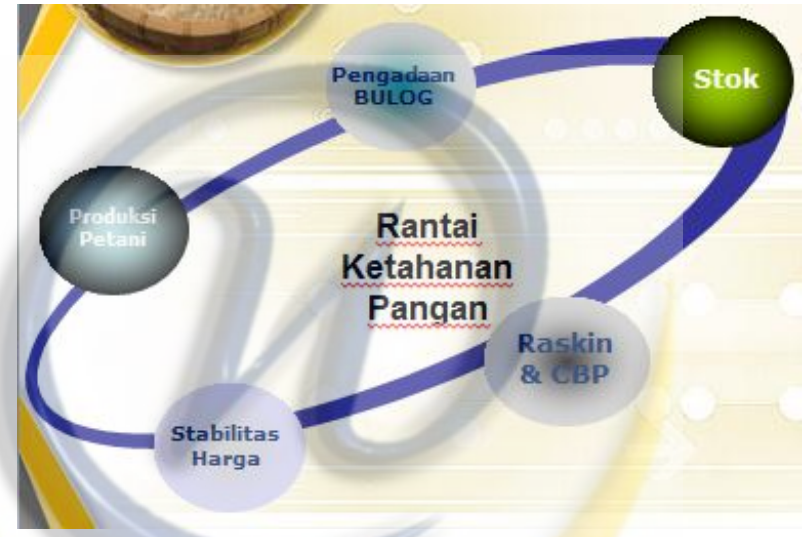

Gambar 2.2 Rantai Pengelolaan Beras BULOG yang Tidak Terpisahkan[3]

Adapun penjelasan dari gambar 2.2 di atas adalah sebagai berikut :

1. Upaya peningkatan produksi padi akan mengakibatkan suplai beras melimpah dan berpotensi terhadap harga beras di bawah HPP.
2. Perlu ada kebijakan pengamanan HPP, yang salah satunya melalui pengadaan DN.
3. Agar gabah / beras yang telah diserap BULOG dapat terus dalam kodisi segar, perlu ada perputaran stok salah satunya melalui penyaluran Raskin dan CBP.
4. Dari sisi ekonomi mikro keluarga, pemberian Raskin adalah salah satu upaya untuk memenuhi sebagian kebutuhan berasnya.

5. Jumlah Raskin dan CBP dan jumlah pengadaan harus seimbang sepanjang tahun untuk menjaga stok tetap pada jumlah yang ideal 2 juta ton setiap saat.[4]

2.8 Data Mining

2.8.1 Pengertian *Data Mining*

Beberapa definisi dari *data mining* antara lain :

1. *Data Mining* adalah proses menemukan kolerasi baru yang memiliki makna, ola dan tren dengan cara memilah – milah data dalam jumlah yang besar yang disimpan dalam repository, menggunakan teknologi penelanan pola, serta teknik – teknik statistic dan matematik. *(Gartner Group)*
2. *Data Mining* adalah proses analisis dari ata set observional (yang sering kali dalam ukuran besar) untuk menemukan relasi explisit dan membuat ringkasan data dengan teknik – teknik tertentu yang dapat dimengerti dan berguna bagi pemilik data. *(David Hand, Heikki Mannila and Padhraic Smyth, Principle of Data Mining, MITPress, Cambridge, MA, 2001)*[11]

Kemajuan luar biasa yang terus berlanjut dalam bidang *data mining* didorong oleh beberapa faktor, antara lain menurut (Larose,2005) :

1. Pertumbuhan yang cepat dalam kumpulan data.
2. Penyimpanan data dalam *data warehouse* sehingga seluruh perusahaan memiliki akses ke dalam *database* yang andal.
3. Adanya peningkatan akses data melalui navigasi web dan internet.
4. Tekanan kompetesi bisnis untuk meningkatan penguasaan pasar dalam globalisasi ekonomi.
5. Perkembangan teknologi perangkat lunak untuk *data mining* (ketersediaan teknologi).
6. Perkembangan yang hebat dalam kemampuan komputasi dan pengembangan kapasitas media penyimpanan.

Data mining bukanlah suatu bidang yang sama sekali baru. Salah satu kesulitan untuk mendefinisikan *data mining* adalah kenyataan bahwa *data mining* mewarisi banyak aspek dan teknik dari bidang – bidang ilmu yang sudah mapan terlebh dahulu. Dapat dilihat pada gambar 2.3 yang dapat dijelaskan bahwa *data mining* memiliki akar yang panjang dari bidang ilmu seperti kecerdasan buatan *(artificial intelligent), machine learning, statistic, database, information retrieval* (Pramudiono, 2006).[12]

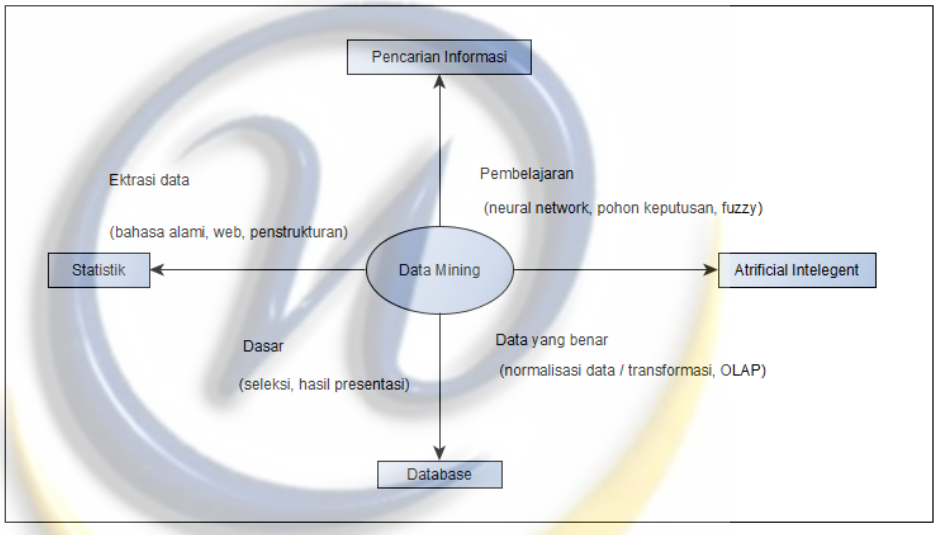

Gambar 2.3 Bidang Ilmu *Data Mining*[11]

2.9 Klasifikasi

Klasifikasi merupakan prose pembelajaran suatu fungsi tujuan (target) f yang memetakan tiap himpunan atribut x ke satu dari tabel yang didefinisikan sebelumnya. Fungsi target disebut juga model klasifikasi, dapat dilihat dalam gambar 2.4.[5]

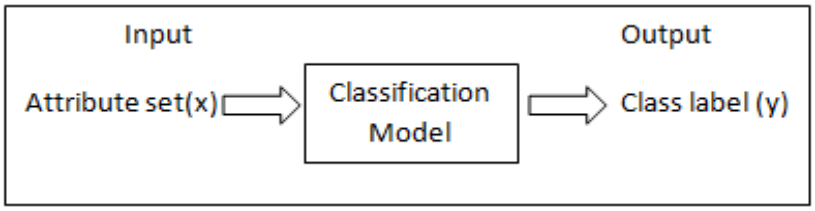

Gambar 2.4 Blok Diagram Model Klasifikasi[5]

Ada dua jenis model Klasifikasi, yaitu :

- Pemodelan Deskriptif (*descriptive modelling*) : Model klasifikasi yang dapat berfungsi sebagai suatu alat penjelasan untuk membedakan objek – objek dalam kelas – kelas yang berbeda.
- Pemodelan Prediktif (*predictive modelling*) : Model klasifikasi yang dapat digunakan untuk memprediksi label kelas *record* yang tidak diketahui.

Teknik klasifikasi cocok untuk memprediksi atau menggambarkan data-set dengan tipe biner atau nominal. Teknik ini kurang efektif digunakan untuk tipe data ordinal (misal untuk mengklasifikan anggota yang berpenghasilan rendah, sedang atau tinggi karena teknik ini tidak mempertimbangkan secara implisit urutan dalam kategori data).[8]

2.9.1 Pendekatan Umum

Teknik klasifikasi *(classifier)* merupakan suatu pendekatan sistematis untuk membangun model klasifikasi dari suatu himpunan data masukkan. Tiap teknik menggunakan suatu algoritma pembelajaran *(learning algorithm)* untuk mendapatkan suatu model yang paling memenuhi hubungan antara himpunan atribut dan label kelas dalam data masukan.

Masukan dari model klasifikasi merupakan sekumpulan *record (training set)*. Tiap *record* meliputi himpunan *attributes*, yang atas salah satu atributnya merupakan *class*. Dimana biasanya data-set dibagi menjadi *training* dan *test sets*, dimana *training set* digunakan untuk membangun model dan *test set* digunakan untuk memvalidasi.

Proses untuk membentuk model klasifikasi dengan suatu algoritma pembelajaran *(training)* berdasarkan himpunan data pembelajaran *(training set)* disebut dengan proses induksi *(induction)* sedangkan proses penerapan model klasifikasi untuk memprediksikan elas label dari

data dalam himpunan data pengujian *(test set)* disebut dengan proses deduksi *(deduction)*. Dapat dilihat pada gambar 2.5.

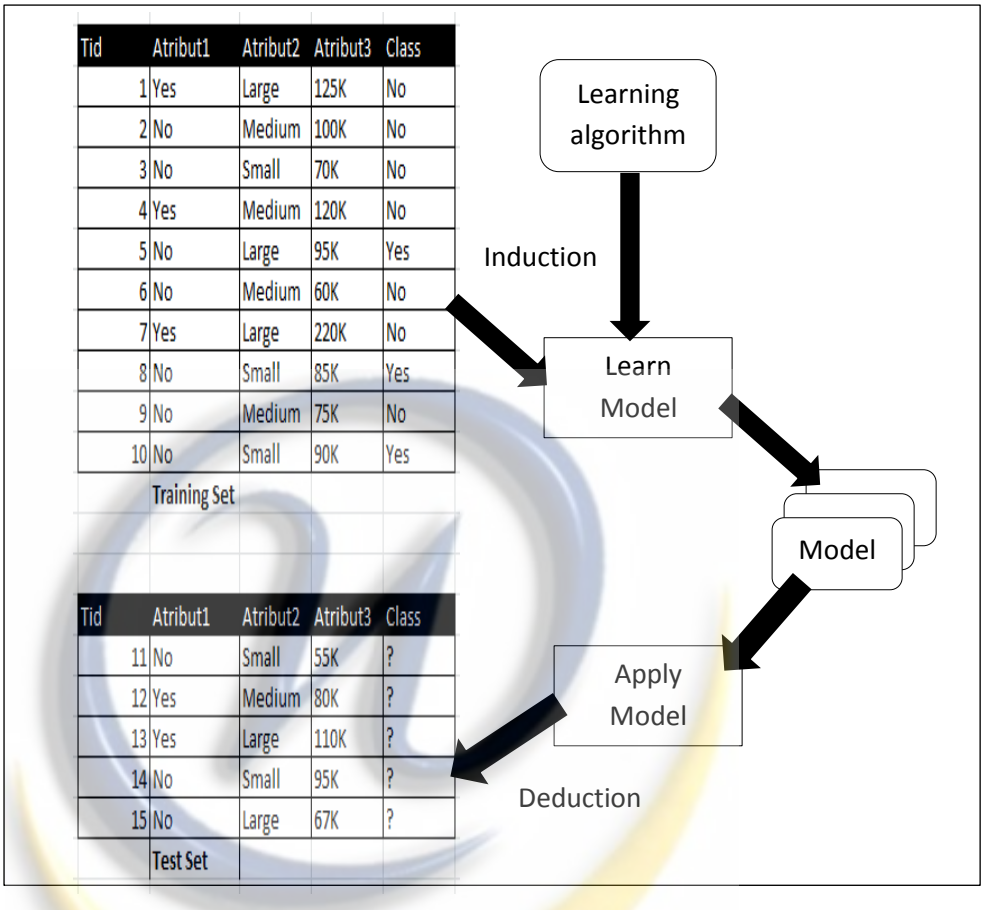

Gambar 2.5 Model Klasifikasi[5]

Untuk mengevaluasi performa dari model yang telah dibangun perlu dilakukan pengukuran akurasi atau tingkat kesalahan *(error rate)*. Jika f menotasikan jumlah *record* dari kelas I yang berada di kelas j pada saat pengujian, maka pengukuran akurasi dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut :[5]

$$Accuracy = \frac{jumlah_{prediksi_{yg_{benar}}}}{jumlah_{prediksi_{keseluruhan}}} = \frac{f11 + f00}{f11 + f10 + f01 + f00}$$

Sedangkan tingkat kesalah *(error rate)* didefinisikan :

$$Erorr = \frac{jumlah_prediksi_yg_salah}{jumlah_prediksi_keseluruhan} = \frac{f11 + f00}{f11 + f10 + f01 + f00}$$

2.10 Pohon Keputusan *(Decision Tree)*

Salah satu metode *data mining* yang umum digunakan adalah *decision tree* (pohon keputusan). Pohon (*tree*) adalah sebuah struktur data yang terdiri dari simpul *(node)* dan rusuk *(edge)*. Simpul apda sebuah pohon dibedakan menjadi tiga, yaitu simpul akar *(root node)*, simpul percabangan / internal *(brach / internal mode)*, dan simpul daun *(leaf node)*.[5] *Decision Tree* adalah struktur *flowchart* yang menyerupai pohon *(tree)*, dimana setiap simpul internal menandakan suatu test pada atribut, setiap cabang hasil tes, dan simpul daun mempresentasikan kelas atau distribusi kelas. Konsep dari *decision tree* adalah mengubah data menjadi pohon keputusan *(decision tree)* dan aturan – aturan keputusan *(rules)*, yang dapat lihatpada gambar 2.6 berikut : [9]

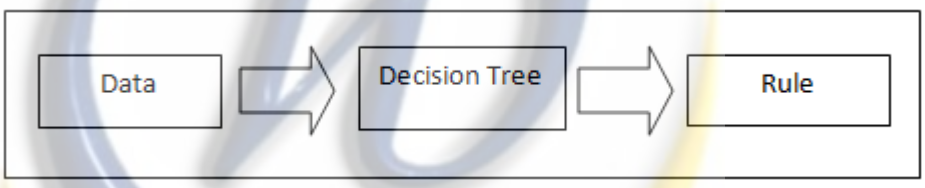

Gambar 2.6 Konsep *Decision Tree*[5]

Pohon keputusan dibangun berdasarkan suatu algoritma induksi. Cara kerja algoritma induksi yaitu memilih atribut yang terbaik untuk memisahkan data secara rekrusif dan mengembangkan simpul daun pada pohon sampai ditemui kriteria untuk berhenti. Misalkan *E* merupakan himpunan data pelatihan dan *F* merupakan himpunan atribut maka secara umum algoritma induksi dapat digambarkan pada *flowchart* sebagai berikut :

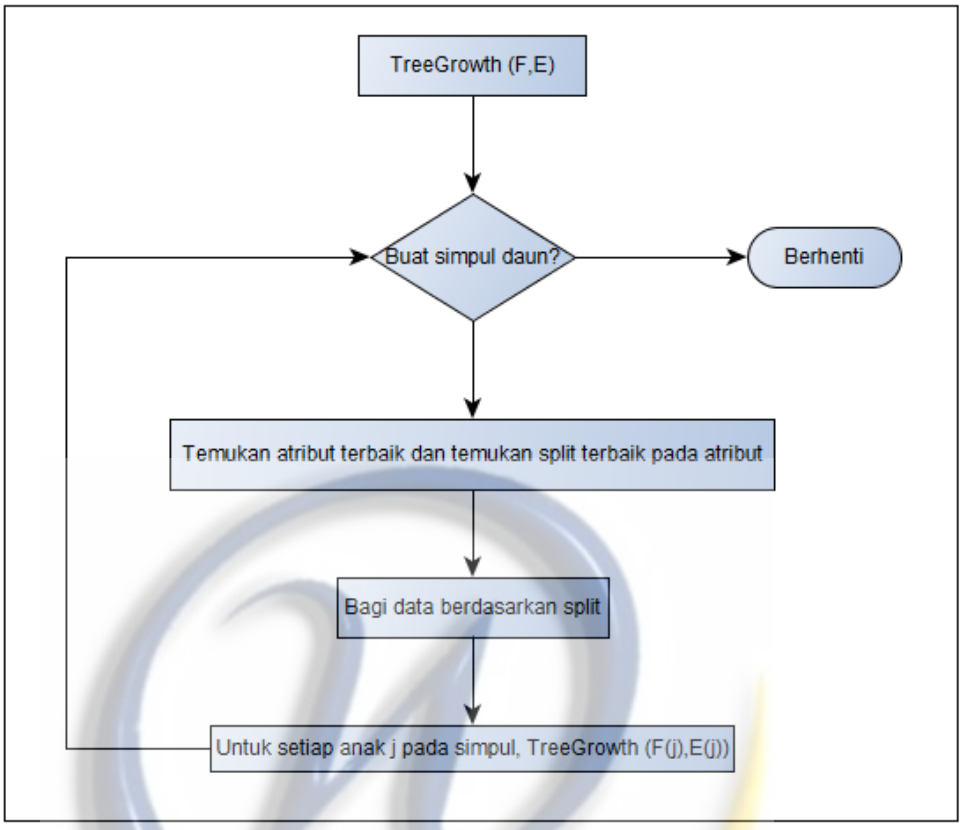

Gambar 2.7 Algoritma Induksi Pohon Keputusan *(Decision Tree)*[5]

2.11 Algoritma C4.5

Algoritma C4.5 adalah algoritma yang digunakan untuk menghasilkan pohon keputusan yang dikebangkan oleh Ross Quinlan. Pohon keputusan yang dihasilkan oleh C4.5 dapat digunakan untuk klasifikasi. Oleh karena itu, algoritma 4.5 sering disebit sebagai *statistical classifier*.[9]

Algoritma ini memiliki *input* berupa *training sample* dan *samples*. *Training sample* berupa data contoh yang akan digunakan untuk membangun sebuah *tree* yang telah diuji kebenarannya. Sesangkan *sample* adalah *field – field* data yang nantinya akan kita gunakan sebagai parameter dalam melakukan klasifikasi data.[8]

Berikut ini akan dijelaskan komponen – komponen yang menyusun algoritma C4.5 dalam membentuk pohon keputusan :

1. *Entropy*

Entropy merupakan distribusi probabbilitas dalam teori informasi dan diadopsi ke dalam algoritma C4.5 untuk mengukur tingkat homogenitas distribusi kelas dari sebuah himpunan data *(data set)*. Sebagai ilustrasi, semakin tinggi tingkat *entropy* dari sebuah *data set* maka semakin homogeny distribusi kelas pada *data set* tersebut.

2. *Information Gain*

Setelah membagi *data set* berdasarkan sebuah atribut kedalam subset yang lebih kecil, *entropy* dari data tersebut akan berubah. Perubahan *entropy* ini dapat digunakan untuk menentukan baus tidaknya pembagian data yang telah dilakukan. Perubahan entropi ini disebut dengan *information gain* dalam algortima C4.5. *Information Gain* ini diukur dengan menghitung selisih antara entropi Idata set Isebelum dan sesudah pembagian *(splitting)* dilakukan. Pembagian yang terbaik akan menghasilkan entropi subset yang aling kecil, dengan demikian berdampak pada *information gain* yang terbesar.[5]